

**PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK ACEH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH
(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH)**

Muhammad Ridha Rami, B.Acct, M.Si, CA

Dosen Tetap STIES Banda Aceh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penatausahaan barang miliknegera terhadap Kualitas laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan an Kekaayaan Aceh . Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif asosiatip, yaitu mengetahui hubungan variable independen Penata Usahaan barang Milik Negara dengan variable dependen Kualitas laporan Keuangan Sampel penelitian ini sebanyak 25 orang responden, dengan menggunakan metoded sensus, yaitu semua populasi yang memenuhi kreiteria ikut diteliti. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu analisis melalui SPSS 17. Dara hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penata USahaan Barang Milik Negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh. Hasil uji- t menunjukkan bahwa Hasil uji $t_{hitung} = 7.326 > \text{tabel } (2,2167)$, tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0.05 (5%). Disamping itu, hasil uji R pada *Model Summary* menunjukkan sebesar 0.700 atau 70 %, , yaitu diatas 50 %, jadi pengaruhnya positif dan relatif kuat.

Kata Kunci : Penata Usahaan BMN , Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dan Permasalahan

Menururt Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah mempunyai kewajiban menggunakan sumberdaya baik berupa barang publik (Barang Milik Negara) maupun jasa publik (Pelayanan Publik) untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, diterbitkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Kedua UU ini berimplikasi pada adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pemerintah (PP), diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Dalam PP ini dijelaskan bahwa yang dimaksud BMN/D adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup pengelolaan BMN/BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 (Menkeu 120/PMK.06/2007), tentang penatausahaan barang milik Negara (BMN) yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dan pada tahun 2009, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 29 Tahun 2010, tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik Negara, mengatur hal-hal yang terkait dengan pemberian kode registrasi dan simbol/logo organisasi.

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disebutkan bahwa Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). .

Penatausahaan Barang milik pemerintah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan pemerintah khususnya neraca yaitu berkaitan dengan pos-pos aset lancar, aset tetap, maupun aset lainnya.

Tugas pokok DPKA dalam pengelolaan Barang Milik Aceh adalah melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Aceh (BMA), yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan

sebagaimana pasal 26 Qanun 14 Tahun 2013. Barang milik Aceh dimaksud Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan bila dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa masih terjadi permasalahan atau fenomena pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, yaitu bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh masih rendah atau belum optimal. Hal ini dapat dilihat hasil audit BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012, dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Rendahnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh, disebabkan antara lain penatausahaan barang milik Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh)”**.

Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah penelitian ini: Apakah Penatausahaan Barang Milik Aceh Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

Sejauhmana pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

Sejauhmana penatausahaan barang milik Aceh berkorelasi dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh penatausahaan Barang Milik Aceh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan tambahan informasi dan atau masukan-masukan yang berguna tentang pengaruh penatausahaan barang milik Aceh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh sehingga dapat merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penatausahaan barang milik Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan tambahan informasi referensi kepada kalangan akademik, terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh penatausahaan barang milik Aceh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh.

c. Bagi Peneliti selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji ilmu pengetahuan tentang pengaruh penatausahaan barang milik Pemerintah Aceh terhadap kualitas laporan Keuangan pada Pemerintah Aceh.

LANDASAN TEORI

Pengertian Barang Milik Negara

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Barang Milik Negara (BMN) sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Yang dimaksud barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis; (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; (c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan (d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan barang milik Negara mendefinisikan barang milik Negara adalah setiap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja dan belanja Pemerinah atau berasal dari sumber lain yang syah.

Jenis Barang Milik Negara

Perlakuan Akuntansi dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membagi barang milik Negara menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lainnya, dan Aset Bersejarah.

Pengertian Penatausahaan BMN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodifikasi. Inventarisasi BMN adalah kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Prosedur Penatausahaan BMN

Menurut Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara, menjelaskan prosedur penatausahaan barang milik Negara sebagai berikut :

Kuasa pengguna barang/engguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang pemilik Negara/daerah kedalam Daftar barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar barang pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara/daerah berupa tanah/dan atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodifikasi barang.

Penggolongan dan kodifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri keuangan .

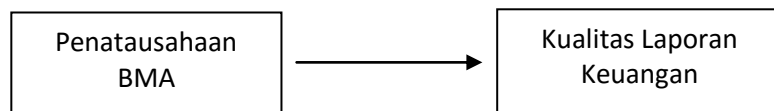
Penggolongan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan menteri Keuangan.

Kerangka Konseptual

. Menurut Sugiyono, (2008:47) mengatakan bahwa kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teori pertautan antara variable independen dan dependen. Pertautan antar variable dirumuskan kedalam bentuk pradigma penelitian. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka kerangka berpikir mengemukakan deskriptif teori untuk masing-masing variable dan dapat membuat pradigma penelitian/ kalau tidak buat pradigma penelitian tidak apa.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik suatu pradigma penelitian atau kerangka konseptual seperti pada gambar berikut ini



Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menentukan/merusukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ho : Penatausahaan Barang Milik Aceh (BMA tidak berpengaruh Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Ha : Penatausahaan Barang Milik Aceh berpengaruh Terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai identitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang berjumlah 120 orang, dengan kriteria sebagai berikut :

Pegawai mempunyai jabatan struktural minimal 1 tahun .

Pegawai yang mempunyai jabatan fungsional minimal 1 tahun.

Staf/Pegawai yang mempunyai tugas pokok penatausahaan barang milik Aceh dan pembuatan laporan keuangan, serta berpengalaman kerja atau pangkat minimal golongan III.

Dari kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria dan dijadikan sebagai populasi sasaran berjumlah 25 orang. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini

Populasi sasaran Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

NO	UNSUR POPULASI	JUMLAH (Org/Responden)
1	Sekretaris	1
2	Ka. Bag. Pengelola Aset	1
3	Kasub.Bag (Kasie)	2
4	Staf gol III	21
Jumlah Populasi Sasaran		25

Sumber Data Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2014 (diolah)

Sehubungan populasi sasaran berjumlah relative kecil, maka metode penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan metode sampel jenuh atau sensus yaitu populasi sasaran yang berjumlah 25 orang/responden, yaitu semua elemen populasi ikut diteliti (Sugiyono, 2014:156)

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. yaitu :

Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan.

Kuesioner .

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden. Dan menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan. Skala pengukuran penelitian dilakukan dengan *skala likert* (Sugiyono,2006:28), dimana skala ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 sampai 5. Skala pengukuran ini dipilih peneliti agar responden memiliki kesempatan atau keleluasaan yang lebih besar (nilai maximum 5) dalam memberikan penilaian yang sesuai dengan persepsi dan kondisi yang mereka alami

Studi Kepustakaan.

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan serta dapat berguna bagi penyusunan penelitian ini. Studi pustaka juga merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Definisi operasionalisasi variabel adalah bagaimana menemukan, dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Pernyataan-pernyataan dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan skala Likert.

Untuk lebih jelasnya definisi masing-masing variable, indicator, dan skala pengukuran dapat dilihat pada table berikut

Operasional Variabel			
Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kualitas Laporan keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.: (PP Nomor 71 Tahun 2010)	1) Relevan	1 – 5
		2) Andal	1 – 5
		3) Dpt dibndingkn	1 – 5
		4) Dpt Dipahami	1 – 5
Penatausahaan Barang Milik Aceh (X)	Penatausahaan BMA adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMA sesuai ketentuan yang berlaku (Qanun Nomor 14 Tahun 2014)	1. Pembukuan 2. Inventarisasi 3. Pelaporan	1 – 5 1 – 5 1 – 5

Metode Uji Validitas dan Reliabilitas

Data yang diperoleh melaui kuesioner harus dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua uji perlu dilakukan untuk mengetahui apa alat ukur yang digunakansesuai dengan yang diukur dan juga melihat konsistensidata yang dikumpulkan. Untuk maksud tersebut akan digunkan program software SPSS (*satistical package for sosial scrence*) yang berfungsi untuk menganalisis data, sebagai berikut :

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau Valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali, 2005). Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable. Sedangkan untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan Kriteria statistik :

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variable tersebut valid

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka variable tersebut tidak valid.

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ tetapi bertanda negative, maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

Uji Keandalan (Reliability)

Untuk mengukur keandalan kuesioner, digunakan uji reliabilitas. Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung Cronbach Alpha masing-masing variable yang terlibat. Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variable yang ada. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga dapat dipakai dengan baik pada kondisi yang berbeda-beda. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan Cronbach Alpha adalah sebesar 0.60 (Malhotra,2004)

Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas Ghazali (2001):

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah metode *Normal Probability Plot*, yang membandingkan distribusi kualitatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kualitatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya Ghazali (2006:166).

Metode Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan alat statistik yaitu regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji dan menganalisis, pengaruh variabel penatausahaan barang Milik Aceh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh dengan studi pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh data diolah dengan menggunakan program *Statistik Package For social Science* (SPSS) (Gujarati,2006:130). Adapun bentuk matematisnya regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keiangan
- α = Konstanta
- β , = Koefisien Regresi
- X = Penatausahaan Barang Milik Aceh
- e = Error term

Rancangan Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Karena penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan uji signifikasi baik *t-test* untuk pengaruh secara parsial maupun *F-test* untuk pengaruh secara bersama-sama. Kesimpulan penelitian diambil langsung dari nilai koefesien regresi masing-masing variabel independen untuk pengaruh secara parsial dan nilai koefesien determinasi untuk pengaruh secara bersama-sama (simultan).

Pengujian Pengaruh Secara Bersama-Sama (Simultan)

Untuk pengujian hipotesis pertama (H1) yaitu pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Menentukan hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a)

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; penatausahaan barang milik Aceh secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Aceh.

H_{a1} : paling sedikit ada satu β_i ($i=1,2,3$) $\neq 0$; penatausahaan barang milik Aceh secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh .

Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis

Jika $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; H_0 diterima

H_{a1} : paling sedikit ada satu β_i ($i=1,2,3$) $\neq 0$; H_0 ditolak

Uji - t (Uji Parsial)

Untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen (penatausahaan barang milik Aceh) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan).

H_{01} : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; penatausahaan barang milik Aceh secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh.

H_{a1} : paling sedikit ada satu β_i ($i=1,2,3$) $\neq 0$; penatausahaan barang milik Aceh secara parsial berpengaruh terhadap kinerja kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh Aceh.

Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis

Jika $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; H_0 diterima

H_{a1} : paling sedikit ada satu β_i ($i=1,2,3$) $\neq 0$; H_0 ditolak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Untuk lebih rinci karakteristik responden dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Karakteristik Responden			
No	Identitas Responden	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin :		
	Pria	16 orang	90
	Wanita	9 orang	10
	Usia Sekarang		
	30 - 40	20 orang	46
	41 - 50	05 orang	49
	51 >	- orang	0 %

2.	Pendidikan :		
	- SMA	17 orang	68
	- D3/ sederjat	6 orang	24
	- Si/ sederjat	2 orang	8
	- S2/ Sedeerjat	-	-

Sumber : Data primer (diolah), Juni 2014

Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut ini:

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penata usahaan BMN	3.8476	0.39487	25
Kualitas Laporan .Keuangan	3.5376	0.54512	25

Sumber : Data primer (diolah), Juni 2014

Dari tabel diatas di ketahui bahwa hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 25 responden. Variabel dependen kualitas laporan keuangan terdiri dari 8 buah pertanyaan pada skala *Likert* 5 poin sedangkan variable bebas menggunakan 6 pertanyaa.. Nilai *mean kualitas lapoan keuangan* sebesar 3.5376. Ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah relative baik 3.5376 relatif baik.

Nilai mean peñata usahaan barang milik negara sebesar 3.8476. Hal ini mengindikasikan bahwa penataan ussahaan barang milik Negara cukup baik yaitu 3.8476 skala liket. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti pernyataan dalam keusioner masing masing variabel tersebut semakin bervariasi. Artinya semakin rendah tingkat standar deviasinya maka semakin homogen artinya bahwa variasi jawaban atau pernyataan semakin kecil.

Uji Instrumen Data

Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel berikut

Hasil Uji Validitas Data

Variabel Penatausahaan Barang Milik Negara t (X)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
A1	.487	0.311
A2	.304	0.311
A3	.527	0.311
A4	.562	0.311
A5	.651	0.311
A6	.228	0.311

Variabel Kualitas Laporan keuangan (Y)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
B1	.412	0.311
B2	.370	0.311
B3	.642	0.311
B4	.377	0.311
B5	.831	0.311
B6	.882	0.311
B7	.831	0.311
B8	.882	0.311

Sumber: Data Primer, juni 2014 (diolah)

Dari penyajian validitas data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh masingmasing item dari variabel penatausahaan barang milik negara dan kualitas laporan keuangan berada diatas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi > 0.311, sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas

Dalam table dibawah ini disajikan hasil uji reabilitas

Hail Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Rata-rata	Jmlh Item	Nilai Alpha	Keandalan
1	Penatausahaan barang Milik	23.5600	6	0.705	Handal
2	Negara t Kualaitas laporan keuangan	32.0400	8	0.878	Handal

Sumber: Data Primer Juni 2014 (diolah)

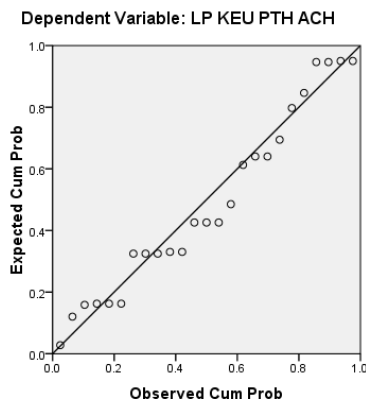
Berdasarkan reliability terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variable berada diatas adalah 0.50. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* dimana nilai alphanya sama atau lebih besar dari Alpha 0.50, (Malhotra, 2005 : 305). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan.

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas, sebagai berikut :

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tampilan grafik normal *probability plot* pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 17.0 for Windows Evolution Version, pengaruh variabel iependenden terhadap variable dependen secara terinci dapat dilihat pada table di bawah ini

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.491	.456		1.077	.292
	BRNG MLK	0.858	.117	.837	7.326	.000
	NEGRA					

Dependent Variable: LP KEU PTH ACH

Sumber : Data primer (diolah), juni 2014

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 17.0 seperti terlihat pada tabed di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.491 + 0.858 X + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut : nilai konstanta sebesar 0.491 . Artinya bilamana faktor penataan usahaan barang milik Negara tetap, maka kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Pemerintah Aceh, mengalami kenaikan sebesar 0.491 .

Koefisien regresi penatrusahaan barang milik Negara (b) sebesar 0,858 , yang berarti koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan nol ($b_1 \neq 0$). Artinya setiap satuan perubahan dalam penataan usaha barang milik Negara akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Pemerintah Aceh, sebesar 0.858, asumsi faktor konstanta tetap

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Hasil Analisis Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.837 ^a	0.700	0.687	0.22000	0.734

a. Predictors: (Constant), BRNG MLK NEGRA

b. Dependent Variable: LP KEU PTH ACH

Sumber : Data primer (diolah), JUNI 2014

Berdasarkan Tabel diatas diinterpretasi sbb : a) diperoleh nilai koefisien korelasi (**R**) : **0,837** dan **R Square = 0.700**. Menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi faktor penatrusahaan barang milik Negara sebesar 70,0 %. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. b) *Standar error of the estimate* = 0.22000 lebih kecil dari standar deviasi = 0.54512. Ini berarti l regresi layak digunakan.

Uji Secara Parsial.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel penatrusahaan barang milik Negara terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, dilakukan uji secara parsial (uji t). Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.491	.456		1.077	.292
	BRNG MLK	0.858	.117	.837	7.326	.000
	NEGRA					

Dependent Variable: LP KEU PTH ACH

Sumber : Data primer (diolah), juni 2014

Berdasarkan table diatas maka koefisien regresi secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut : Hasil pengujian data diketahui bahwa penatausahaan barang milik Negara t mempunyai $t_{hitung} = 7.326 > \text{tabel } (2,2167)$ dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima . Hal ini berarti bahwa variable penatausahaan barang miik negara secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatn dan Kekayaan Aceh .

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien X sebesar 0.858, artinya penataan usahaan barang milik Negara berpengaruh terhadap kualitas lapoan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Jadi H_0 ditolak dan menerima H_a karena $0.858 \neq 0$. yaitu setiap terjadi peningkatan penatausahaan barang milik Negara akan menaikkan kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Jadi terjadi pengaruh positif antara penatausahaan barang miliknegara terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, dan pengaruhnya signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis determinasi model summary adalah R Squares sebesar 0.700 atau 70,0 % (di atas 50 %). Jadi pengaruh penatausahaan barang miliknegara adalah positif dan signifikan, karena R Squares sebesar 0.700 atau 70,0 % (di atas 50 %).

Makna lain yang terkandung dari hasil analisa ini adalah bahwa setiap terjadi penialain kembali atau penyesuaian harga barang milik Negara setiap tahun, maka akan mempengaruhi

kualitas laporan keuangan yaitu nilai laporan keuangan akan lebih wajar dan sesuai dengan akuntansi IFRS yang saat telah diterapkan di Indonesia. Disamping itu, hal ini menunjukkan bahwa pembuatan pencatatan laporan aset barang milik Negara menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* di Instansi Pemerintah Aceh sudah berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Secara parsial terdapat pengaruh signifikan penatausahaan barang milik Negara terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh,. Hal ini dapat dilihat Hasil uji $t_{hitung} = 7.326 > \text{tabel } (2,2167)$ Hal ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya terjadi peningkatan penatausahaan barang milik negara yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh .

Pengaruh antara variabel penatausahaan barang milik Negara terhadap kualitas laporan keuangan relative tinggi, hal ini dapat dilihat hasil uji R pada *Model Summary* yaitu sebesar 0.700, yaitu diatas 50 %, jadi pengaruhnya positif dan relatif kuat.

Saran

Disarankan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, untuk mempertahankan dan meningkatkan penatausahaan barang milik Negara terutama penyesuaian harga setiap tahun, pencatatan kekayaan yang baik dan benar, dan sebagainya, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh..

Disarankan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh,, memberikan kesempatan kepada pegawai yang menangani barang milik negara untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan beban tanggung-jawabnya melalui pendidikan dan pelatihan khusus Barang Milik Negara.. Disamping itu, pegawai yang menangani penatausahaan barang milik Negara adalah orang yang mempunyai pengalaman/background akuntansi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dwi,Pratiwi,Sari (2012), Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara di Bidang Perlakuan Khusus,(Studi Khusus :Mako Koprs Brimod Polri Kelapa Dua Depok Tahun 201), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PPMK.06/2005 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN,
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Aceh Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, Penerbit Pemerintah Aceh, Banda Aceh.
- Rahmad, (2013), Analisa Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Negara (Asset) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan DPKA Kota Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP Negeri Semarang.
- Rahmad, S, (2013), Analisa Penatausahaan Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Sumatera Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Negeri Palembang.
- Sugiyono, (2014), **Metode Penelitian Manajemen**, Alfabeta IKAPI, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Willy,Yanti,Ningsih, (2012), Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan DPKA Kota Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP Negeri Semarang.